



PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.P/2024/PA.Mdo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MINAHASA UTARA, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di Jaga I Desa Mantehage Tangkasi Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 19/Pdt.P/2024/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Mei 1974 para Pemohon telah melaksanakan pernikahan menurut Agama Islam di Kantor KUA Banjer Kota Manado, dengan wali nikah yaitu Bapak Rondor dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp.1.500,- (Seribu lima Ratus Rupiah) dibayar tunai, dan yang menjadi *munakih*/penghulu adalah Bapak Rondor serta

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2024/PA.Mdo



yang menjadi saksi ketika itu adalah Bapak Halim dan Bapak Djafar Suleman;

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Jejak sementara Pemohon II berstatus Perawan;

4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut di KUA Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara;

5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan sebagaimana Suami Istri (*Ba'da Dukhul*) dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:

5.1. Hairun Boyoh;

5.2. Hanisah Boyoh;

5.3. Mursid Boyoh;

5.4. Risno Boyoh;

6. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan nantinya untuk pengurusan segala yang berkaitan dengan pendataan;

7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);

8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.3 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Maka para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Wori untuk dicatat dalam daftar yang disediakan;

9. Bahwa Para Pemohon tidak sanggup untuk membayar biaya perkara sebab termasuk masyarakat tidak mampu/miskin sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Keluarga Miskin dari Desa

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mantehage II Tangkasi Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara
dengan No: 012/SKKM/DMT/II/2024 ditanda tangani oleh xxxxx xxx
Wahjuddin Suhu tertanggal 05 Februari 2024;

10. Bahwa para Pemohon tidak sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Manado cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado
memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya
berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Arsyad Boyoh**) dan
Pemohon II (**Un Tumewu**) yang dilangsungkan pada tanggal 19 Mei 1974
di Desa Kantor KUA Banjar;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini
kepada KUA Kecamatan Wori sesuai dengan alamat domisili yang tertera
di atas, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara terhadap para Pemohon;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk berperkara
secara cuma-cuma, Ketua Pengadilan Agama Manado telah membuat
penetapan, tanggal 26 Februari 2024 dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat.;
2. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara prodeo;
3. Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan pada
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 04 Pengadilan Agama
Manado Tahun 2024;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon telah
hadir sendiri di persidangan;

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2024/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MINAHASA UTARA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena tetangga dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Waktu pelaksanaan akad nikah atau pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yaitu pada tanggal 19 Mei 1974 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Kantor KUA Banjer Kota Manado;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah bapak yaitu Bapak Rondor sekaligus penghulu yang menjadi wali nikah saat akad nikah tersebut dilangsungkan;
- Bahwa Mahar yang diberikan Pemohon I dalam pernikahan tersebut berupa uang tunai sebesar Rp.1.500,- (Seribu lima Ratus Rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan tersebut adalah Bapak Halim dan Bapak Djafar Suleman;
- Bahwa Karena para Pemohon tidak pernah mengurusnya di KUA Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa dengan alasan biaya;
- Bahwa Status Pemohon I saat itu adalah perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah baik garis keturunan dan sepersusuan;
- Bahwa Para Pemohon ingin mengurus buku akta nikah mereka ke KUA Kecamatan Wori, karena dokumen tersebut sangat penting bagi para Pemohon untuk mengurus berbagai keperluan

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2024/PA.Mdo



administrasi lainnya di desa dan di kecamatan;

- Bahwa Sampai saat ini para Pemohon masih tetap suami isteri
- 2. **SAKSI 2**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxx xxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MINAHASA UTARA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena tetangga dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Waktu pelaksanaan akad nikah atau pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yaitu pada tanggal 19 Mei 1974 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Kantor KUA Banjer Kota Manado;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah bapak yaitu Bapak Rondor sekaligus penghulu yang menjadi wali nikah saat akad nikah tersebut dilangsungkan;
 - Bahwa Mahar yang diberikan Pemohon I dalam pernikahan tersebut berupa uang tunai sebesar Rp.1.500,- (Seribu lima Ratus Rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa Yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan tersebut adalah Bapak Halim dan Bapak Djafar Suleman;
 - Bahwa Karena para Pemohon tidak pernah mengurusnya di KUA Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa dengan alasan biaya;
 - Bahwa Status Pemohon I saat itu adalah perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah baik garis keturunan dan sepersusuan;
 - Bahwa Para Pemohon ingin mengurus buku akta nikah mereka ke KUA Kecamatan Wori, karena dokumen tersebut sangat penting bagi para Pemohon untuk mengurus berbagai keperluan administrasi lainnya di desa dan di kecamatan;
 - Bahwa Sampai saat ini para Pemohon masih tetap suami isteri

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2024/PA.Mdo



Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok para pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa pemohon I dengan pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kantor KUA Banjer Kota Manado, dengan wali nikah yaitu Bapak Rondor dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp.1.500,- (Seribu lima Ratus Rupiah) dibayar tunai, dan yang menjadi *munakih*/penghulu adalah Bapak Rondor serta yang menjadi saksi ketika itu adalah Bapak Halim dan Bapak Djafar Suleman, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pengurusan berbagai keperluan administrasi lainnya di desa dan di kecamatan;

Menimbang, bahwa para pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka majelis hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena tetangga

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2024/PA.Mdo



dan mengetahui pernikahan para Pemohon;

- Bahwa Waktu pelaksanaan akad nikah atau pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yaitu pada tanggal 19 Mei 1974 para Pemohon telah melaksanakan pernikahan menurut Agama Islam di Kantor KUA Banjer Kota Manado;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah bapak yaitu Bapak Rondor sekaligus penghulu yang menjadi wali nikah saat akad nikah tersebut dilangsungkan;
- Bahwa Mahar yang diberikan Pemohon I dalam pernikahan tersebut berupa uang tunai sebesar Rp.1.500,- (Seribu lima Ratus Rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan tersebut adalah Bapak Halim dan Bapak Djafar Suleman;
- Bahwa Karena para Pemohon tidak pernah mengurusnya di KUA Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa dengan alasan biaya;
- Bahwa Status Pemohon I saat itu adalah perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah baik garis keturunan dan sepersusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan para pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II;

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Manado, Nomor **19/Pdt.P/2024/PA Mdo** tanggal **26 Februari 2024**, tentang Pembebanan Biaya Perkara pada Anggaran Negara, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Manado tahun 2024;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**Un Tumewu Binti Ahmed Tumewu**) yang dilangsungkan pada tanggal 19 Mei 1974 di Desa Kantor KUA Banjar;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Wori sesuai dengan alamat domisili yang tertera di atas, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebankan biaya perkara pada DIPA Pengadilan Agama Manado Tahun 2024.

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1445 Hijriah oleh kami Drs. H. Muhtar Tayib sebagai ketua majelis, Hj. Rukijah Madjid, S.Ag., M.H. dan Dewi Angraeni Kasim, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis beserta para hakim anggota tersebut, dan didampingi oleh Rahmawati, SH.,MH .sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2024/PA.Mdo



Hj. Rukijah Madjid, S.Ag., M.H.

Drs. H. Muhtar Tayib

Dewi Angraeni Kasim, S.H.

Panitera Pengganti,

Rahmawati, SH.,MH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp ,00
- ATK Perkara : Rp 0,00
- Panggilan : Rp 0,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 20.000,00

(dua puluh ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2024/PA.Mdo